



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



TEKNIK PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BUKU KEEMPAT

USAID LESTARI

**Melindungi Hutan, Mengurangi Emisi,
Melestarikan Keanekaragaman Hayati**

TEKNIK PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Diterbitkan pertama kali oleh

USAID LESTARI

WISMA GKBI, 12th Floor, Suite 1210

Jl. Jenderal Sudirman No. 28,

Jakarta Indonesia 10210

Tel. : 021 574 0565, Fax: 021 574 0566

Email: info@lestari-indonesia.org

Cetakan pertama, Januari 2018

Penulis

FIELD Foundation

Augusta Mindry Anandi

Kontributor

Christopher Bennett

Editor

Sugiarto Arif Santoso

Desain dan ilustrasi

Donald Bason

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

Dipersiapkan untuk U.S. Agency for International Development oleh Tetra Tech ARD dibawah kontrak No. AID-497-TO-15-00005.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID). Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tetra Tech dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

TEKNIK PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BUKU KEEMPAT



USAID LESTARI

Melindungi Hutan, Mengurangi Emisi,
Melestarikan Keanekaragaman Hayati

Sekilas tentang LESTARI

Proyek USAID LESTARI mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia (RI) menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), melestarikan keanekaragaman hayati di ekosistem hutan dan mangrove yang bernilai secara biologis serta kaya akan simpanan karbon. Dibangun diatas pondasi proyek USAID IFACS, LESTARI menerapkan pendekatan lanskap, yaitu sebuah kerangka kerja manajemen tata guna lahan terintegrasi yang berupaya untuk mensinergikan kebijakan lintas sektor dengan tujuan guna menyelaraskan pembangunan dan tujuan konservasi. Upaya ini bisa dicapai melalui perbaikan tata guna lahan, tata kelola hutan lindung, perlindungan spesies kunci, praktik sektor swasta dan industri yang berkelanjutan, serta peningkatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi. Proyek LESTARI diimplementasikan oleh Tetra Tech bersama mitra konsorsium yang terdiri dari WWF-Indonesia, Winrock International, Wildlife Conservation Society (WCS), Blue Forests, Yayasan Sahabat Cipta, PT Hydro South Pole Carbon, Sustainable Travel International (STI), Michigan State University, dan FIELD Foundation. Proyek LESTARI berlangsung dari Agustus 2015 hingga Juli 2020.

TUJUAN LOKAL DAN GLOBAL

Hutan hujan tropis di Indonesia yang luas, lahan gambut, dan hutan bakau mengandung cadangan karbon bagi kepentingan lokal dan global. Hutan-hutan ini juga merupakan sumber keanekaragaman hayati dengan berbagai spesies penting dan menyediakan jasa ekosistem yang berharga, seperti penyediaan air bersih dan menyediakan sumber penghidupan, bagi lebih dari 30 juta orang. Sayangnya, deforestasi dan degradasi hutan mengancam keberadaan hutan hujan tropis di Indonesia. LESTARI mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman yang memiliki dampak lokal dan global ini.

FOKUS GEOGRAFIS

LESTARI bekerja di enam lanskap yang dicirikan oleh wilayah hutan primer utuh, cadangan karbon tinggi, dan kekayaan keanekaragaman hayati. Lanskap tersebut berada di Aceh (Lanskap Leuser), Kalimantan Tengah (Lanskap Katingan-Kahayan), dan Papua (Lanskap Lorentz, Mappi-Bouven Digoel, Sarmi dan Cyclops).



Hasil yang ingin dicapai adalah:

- Penurunan total emisi CO₂ ekuivalen sebesar 41 persen dari kegiatan pemanfaatan lahan, perubahan pemanfaatan lahan dan deforestasi di seluruh wilayah lanskap proyek;
- Perbaikan pengelolaan 8,42 juta hektar hutan primer atau sekunder, termasuk wilayah yang menjadi habitat orangutan;
- Perbaikan manajemen paling tidak, di enam wilayah konservasi, sehingga mampu melestarikan habitat orangutan dan spesies kunci lainnya, dan mengurangi perburuan spesies hewan endemik;
- Paling tidak terwujud sepuluh Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) yang memromosikan pembangunan rendah emisi dan pembangunan berbasis konservasi;
- Penggalangan dana dari sumber pemerintah dan swasta, dalam bentuk investasi bersama guna menunjang keberhasilan proyek;
- Meningkatnya komitmen para pemangku kepentingan dari sektor swasta, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan berikut perlindungan spesies yang hidup di dalamnya;
- Terciptanya kebijakan, undang-undang, peraturan, dan prosedur - yang mendukung pembangunan rendah emisi, perbaikan pengelolaan dan konservasi hutan – yang disahkan dan diterapkan di semua jenjang; dan
- Terdapat model untuk integrasi strategi pembangunan rendah emisi dan konservasi hutan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional yang didistribusikan ke semua level pemerintahan dan pemangku kepentingan kunci lainnya.

STRATEGI

LESTARI memiliki tiga kegiatan tematik yang saling terkait: 1) Tata Kelola Hutan dan Lahan, serta advokasi, 2) Kemitraan dalam Konservasi, dan 3) Pelibatan Pihak Swasta. Masing-masing tema teknis diterapkan dengan sinergis dan dukung oleh berbagai pendekatan strategis.



DAFTAR ISI

SEKILAS TENTANG LESTARI	i
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iv
KATA PENGANTAR	I
BAB 1: TEKNIK IDENTIFIKASI LIMA MODAL.....	2
1.1. Pengantar	2
1.2. Menemukan Lima Modal	4
1.3. Format Hasil Pengkajian 5 Modal	4
BAB 2: TEKNIK PENGKAJIAN SKETSA DESA	7
2.1. Pengantar	7
2.2. Langkah Menyusun Sketsa Desa	8
2.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan	10
BAB 3: PENELUSURAN WILAYAH	11
3.1. Pengantar	11
3.2. Langkah Penelusuran Wilayah	12
BAB 4: TEKNIK MEMBUAT PETA DASAR	14
4.1. Pengantar	14
4.2. Langkah Membuat Peta Dasar	14
4.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan	15
BAB 5: ANALISIS KALENDER MUSIM	16
5.1. Pengantar	16
5.2. Langkah Menganalisis Kalender Musim	17
5.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan	18
BAB 6: TEKNIK MEMBUAT DIAGRAM KELEMBAGAAN (DIAGRAM VENN)	19
6.1. Pengantar	19
6.2. Langkah Membuat Diagram Kelembagaan	19
6.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan	21
DAFTAR BACAAN	22

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Desa	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Pusat	Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
BPD - Badan Permusyawaratan Desa	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Kewenangan Desa	Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa.
Keuangan Desa	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
RPJM Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
RKP Desa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa	Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
APB Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Dana Desa	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
ADD Alokasi Dana Desa	Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Transfer ke Daerah	Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
Musrenbang Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Adalah forum musyawarah yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 6 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
Musdus Musyawarah Dusun	Musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa pada tingkat dusun.
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah	Terdiri dari rencana tata ruang wilayah Nasional (RTRW Nasional), Provinsi (RTRW Provinsi), dan Kabupaten (RTRW Kabupaten dan RTRW Kotamadya). Jangka waktu masing-masing rencana tata ruang adalah 25 tahun, 15 tahun, dan 10 tahun. Semua rencana tata ruang dievaluasi setiap 5 tahun.

	RTRW selanjutnya dibagi lagi dalam zona-zona pemanfaatan lahan: Kawasan Strategis, Kawasan Zonasi dan pada tingkat desa Kawasan Pedesaan.
RDTR - Rencana Detail Tata Ruang	Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
Zonasi	I. Rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai kesatuan dalam ekosistem; 2. Pembagian lingkungan kota menjadi zona-zona yang lebih kecil bagi pengendalian ruang dan pemberlakuan ketentuan hukum yang berbeda.
KPH Kesatuan Pengelola Hutan	KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Perhutanan Sosial	Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
RPHD Rencana Pengelolaan Hutan Desa	RPHD adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.
Deforestasi	Perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan.
Kawasan hutan	Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
Desa Hutan	Desa yang berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencaharian/pekerjaan masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan.
Peta RBI Peta Rupa Bumi Indonesia	Peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Citra Satelit	Salah satu data penunjang dalam kegiatan geospasial. Misalnya dalam pembuatan sketsa desa dalam penyusunan RPJM Desa.
GPS <i>The Global Positioning System</i>	Sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasian (<i>synchronization</i>) sinyal satelit. Sistem ini menggunakan satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi.

HHBK
Hasil Hutan Bukan
Kayu

Segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IUPHHK
Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu

Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.



Kata Pengantar

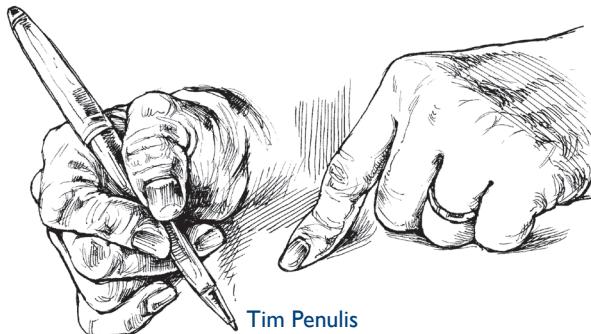
Secara umum panduan ini diharapkan ikut membantu memperkuat tata kelola hutan di tingkat desa dengan meningkatkan kepercayaan antara kelompok masyarakat desa, pemerintahan desa dengan instansi kehutanan setempat. Diharapkan bahwa pendekatan penguatan tata kelola hutan di tingkat desa ini juga bisa meningkatkan koordinasi semua pihak untuk berkolaborasi sepenuhnya demi kepentingan pengelolaan ekosistem hutan untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJM Desa, salah satu tahap penting yang harus dilalui adalah pengkajian keadaan desa yang meliputi kegiatan penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan. Pengkajian keadaan desa akan menghasilkan pemetaan mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Buku keempat ini merupakan panduan teknis untuk melengkapi tahapan pengkajian keadaan desa yang tertuang dalam buku kedua.

Proyek LESTARI menyadari bahwa pengkajian keadaan desa kenyataannya mempunyai beragam teknik penggalian data dan informasi desa. Namun dalam hal ini Proyek LESTARI menawarkan teknik-teknik pengkajian keadaan desa berdasarkan pengalaman proyek di tiga provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Tengah dan Papua. Teknik pengkajian keadaan desa yang dimaksud yaitu; (1) teknik pengkajian lima modal, (2) membuat sketsa desa, (3) menelusuri wilayah, (4) membuat peta dasar, (5) kalender musim, dan (6) diagram kelembagaan. Panduan ini akan membahas keenam teknik tersebut berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Tim Lapangan Proyek LESTARI. Dalam konteks Proyek LESTARI, maka dapat dikatakan bahwa teknik-teknik tersebut sangat relevan digunakan oleh desa-desa di sekitar dan dalam hutan seperti area kerja proyek di tiga provinsi. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan masyarakat desa semakin baik dalam merencanakan pembangunan dengan tetap menjaga lingkungan yang berkesimanbungaan.

Pelaksana panduan ini, yang utama, adalah pendamping desa untuk mengasistensi tim penyusun RPJM Desa. Panduan ini juga dapat langsung diterapkan oleh tim penyusun RPJM Desa bila pendamping desa berhalangan atau tidak ada. Panduan ini cukup praktis dan sederhana disertai contoh-contoh berdasarkan pengalaman penyusunan RPJM Desa baik dalam proyek LESTARI maupun proyek-proyek lainnya.

Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemandu-pemandu di desa baik tim penyusun RPJM Desa, pendamping desa, maupun pemerintahan desa untuk mengetahui secara sederhana teknik-teknik pengkajian keadaan desa.



Tim Penulis

TEKNIK IDENTIFIKASI LIMA MODAL

I.I. Pengantar

Dalam penyusunan RPJM Desa, teknik identifikasi lima modal merupakan salah satu teknik pengkajian yang digunakan untuk melengkapi analisis data desa dalam rangka penyelarasan data desa. Dokumen yang dihasilkan dari identifikasi lima modal adalah data desa yang selanjutnya akan menjadi lampiran Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Identifikasi lima modal dimulai dengan mengidentifikasi keadaan sumber-sumber daya di dusun. Salah satu pengkajian keadaan di dusun untuk RPJM Desa adalah soal mata pencaharian masyarakat dusun. Secara umum, mata pencaharian masyarakat dusun dibangun oleh beberapa komponen, yang bisa disebut sebagai modal-modal mata pencaharian (modal yang bisa dipakai untuk membangun mata pencaharian yang baik), atau bisa pula disebut sebagai syarat-syarat mata pencaharian (syarat yang harus tercukupi/terpenuhi dengan baik jika ingin mata pencahariannya baik). Modal-modal tersebut adalah:

1. Modal manusia atau sumber daya manusia (SDM). Kajian ini menilai kemampuan manusia terkait dengan tiga sektor yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan. Berdasarkan tiga sektor ini maka dinilai kemampuan manusia pada beberapa kondisi diantaranya kondisi sawah, kondisi kebun, kondisi kolam ikan, dan sebagainya.
2. Modal sosial atau sumber daya sosial-budaya. Kajian ini diharapkan dapat menggambarkan situasi masyarakat terkait kehidupan mereka sehari-hari.
3. Modal fisik atau sumber daya fisik. Kajian ini menilai kondisi bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya yang terdapat di desa.
4. Modal alam atau sumber daya alam. Kajian ini terfokus pada faktor-faktor terkait dengan kondisi alam baik hutan, tanah, air, sungai, alur, mata air dan lain sebagainya.
5. Modal finansial atau sumber daya finansial. Kajian modal ini menilai faktor yang membantu perputaran uang di dusun dan desa sehingga mempercepat atau menghambat pembangunan di desa.



Ada banyak cara untuk memandang lima modal mata pencaharian tersebut, misalnya:

- Bila kelima modal tersebut ada secara seimbang dan cukup, maka mata pencaharian masyarakat akan berjalan baik.
- Bila ada modal yang timpang, maka mata pencaharian masyarakat akan berjalan dengan tidak baik pula.
- Ketimpangan atau kurangnya modal-modal tertentu bisa saja diakibatkan oleh praktik mata pencaharian yang justru merusak modal itu sendiri.
- Kurang atau rusaknya modal-modal yang ada bisa pula diakibatkan oleh adanya faktor luar.
- Adanya modal yang sudah baik/kuat bisa didayagunakan untuk menyelamatkan ataupun memperkuat modal yang rusak atau masih lemah.

Dengan mengidentifikasi dan memahami kondisi/kualitas modal-modal yang ada di dusun, diharapkan peserta mendapatkan gambaran yang semakin jelas tentang kondisi ekosistem dan mata pencahariannya di dusun. Desa, yang merupakan gabungan dari beberapa dusun, dapat memperkirakan kapasitas atau daya dukung sebuah dusun dalam berbagai usulan di setiap permasalahan dan potensi yang ada. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari RPJM Desa yaitu “Keberlanjutan dan Kemandirian”, Keberlanjutan dalam setiap modal yang ada dan Kemandirian dalam pelaksanaan dan pemanfaatan modal yang ada.

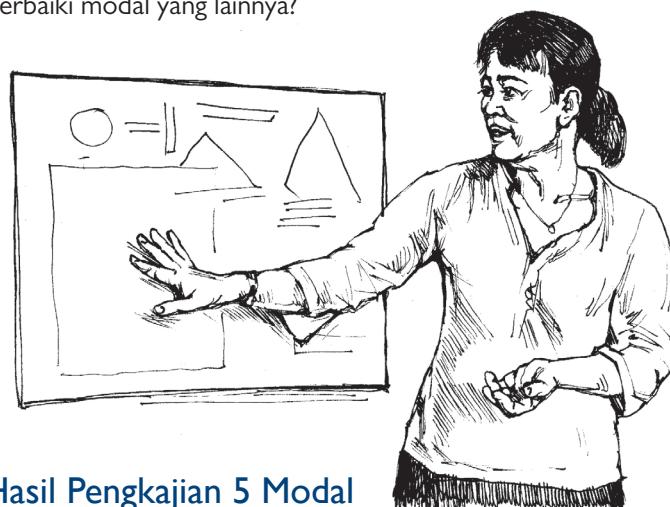


Kehidupan masyarakat Kamora yang tidak lepas dari sumber daya hutan untuk kehidupan mereka, mengukir dengan kayu besi.

1.2. Menemukan Lima Modal

Salah satu cara yang digunakan untuk menggali potensi dusun adalah dengan teknik lima modal. Teknik penggalian lima modal dilakukan di dusun dan difasilitasi oleh tim penyusun RPJM Desa. Peran pendamping desa mengasistensi tim penyusun RPJM Desa agar mencapai hasil yang maksimal. Penggalian dengan teknik lima modal tidak memerlukan waktu lama, hanya sekitar 2-3 jam atau satu sesi. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Pemandu secara singkat menjelaskan tujuan dari sesi ini
2. Pemandu mengajak peserta untuk curah pendapat tentang modal-modal yang ada di dusun. Setelah beberapa contoh muncul, kemudian pemandu mengajak peserta untuk menggolongkannya ke dalam lima modal, yakni: modal manusia, sosial, fisik, alam, dan finansial.
3. Selanjutnya, pemandu meminta peserta untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi lima modal yang ada di dusunnya. Pertanyaan yang diajukan dalam menggarap lima modal ini antara lain :
 - Apa saja modal-modal mata pencaharian di dusun kita?
 - Bagaimana kondisi / kualitasnya?
 - Bagaimana keseimbangan modal-modal mata pencaharian desa kita?
 - Bagaimana kondisi sumber daya alam seperti sungai atau hutan?
 - Apa saja modal yang rusak akibat praktik mata pencaharian kita?
 - Apa saja modal yang masih lemah / perlu penguatan?
 - Apa saja modal yang sudah kuat dan bisa kita gunakan untuk memperbaiki modal yang lainnya?



1.3. Format Hasil Pengkajian 5 Modal

Setelah lima modal ditemukan melalui diskusi sebagaimana tersebut diatas, maka biasanya temuan tersebut dapat menjelaskan dua hal: pertama, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa; dan kedua, masalah yang dihadapi desa. Tugas Tim Penyusun RPJM Desa membuat daftar lima modal yang sudah didiskusikan dan memasukkannya ke dalam format data desa. Selanjutnya format data desa dilaporkan kepada Kepala Desa dan disetujui. Dibawah ini contoh format kajian lima modal yang terdiri atas (1) Format Daftar Sumber Daya Pembangunan (Fisik), (2) Format Sumber Daya Manusia, dan (3) Format Sumber Daya Sosial Budaya.

FORMAT PENGKAJIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN (FISIK)

Dusun :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	[Contoh:] Aset Prasarana Umum A Jalan B Jembatan C Gorong-gorong D Tempat ibadah	5,6 3 22 1	Km Unit Unit Unit
2.	...		

Mengetahui,
 Kepala Desa

Dusun ..., Tanggal
 Ketua Tim Penyusun
 RPJM Dusun

[Nama]

[Nama]

FORMAT PENGKAJIAN SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Dusun :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan

Mengetahui,
 Kepala Desa

Dusun ..., Tanggal
 Ketua Tim Penyusun
 RPJM Dusun

[Nama]

[Nama]

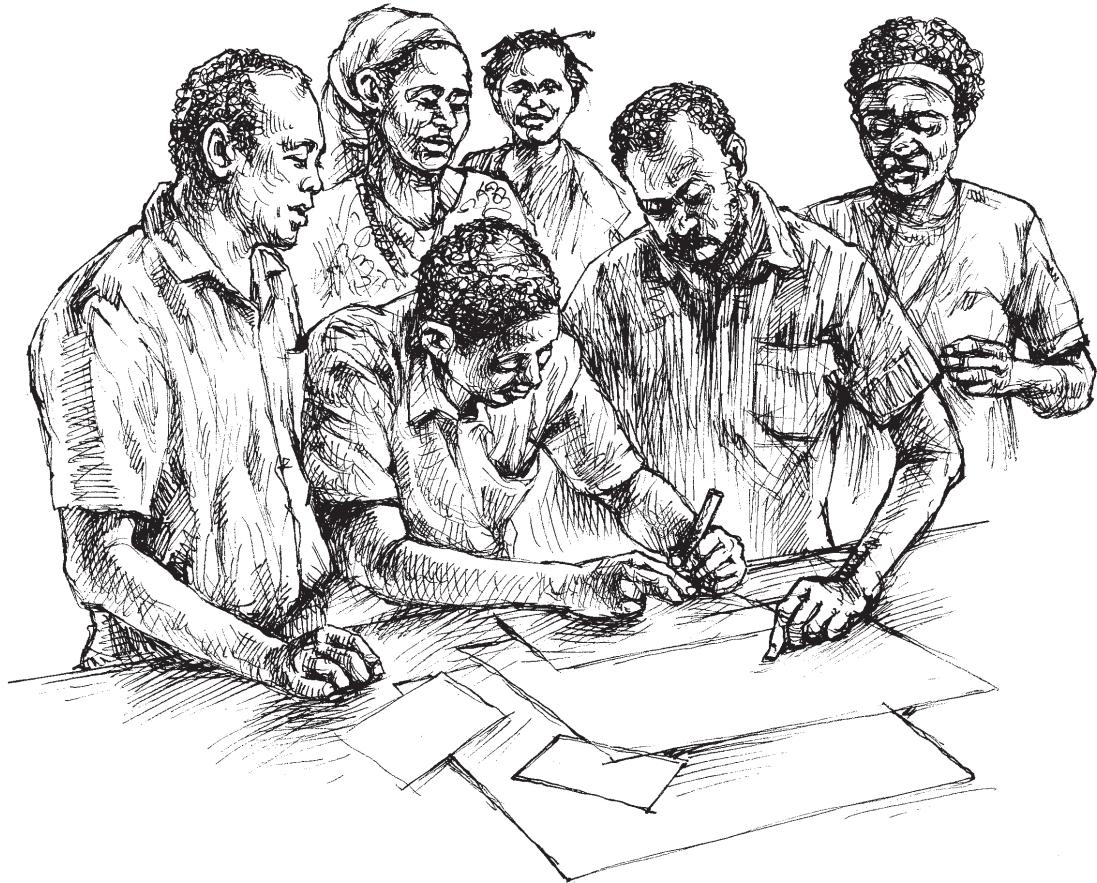
FORMAT PENGKAJIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

<u>DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA</u>			
No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Mengetahui,
Kepala Desa [Nama]

Dusun ..., Tanggal
Ketua Tim Penyusun
RPJM Dusun [Nama]



TEKNIK PENGKAJIAN SKETSA DESA

2.1. Pengantar

Teknik pengkajian dengan sketsa desa bertujuan agar desa dapat memetakan dan mengidentifikasi berbagai potensi wilayah yang ada yang meliputi lima modal (sumber daya), aktivitas mata pencaharian, dan daya dukung wilayahnya. Pengkajian dengan sketsa desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan warga dari berbagai keterwakilan masyarakat antara lain perempuan, pemuda, penyandang cacat dan lain-lain yang difasilitasi oleh tim penyusun RKP Desa dan Pendamping desa.

Teknik sketsa desa disusun dengan mengacu pada hasil pengkajian lima modal. Misalnya pada mata pencaharian masyarakat (aktivitas ekonomi maupun kehidupan lainnya), petani sangat bergantung kepada beberapa sumber daya di desa seperti kualitas lahan sawah, ladang ataupun kebunnya, ketersediaan air yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pertanian, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, disadari atau tidak, mereka sangat berkepentingan dengan kelestarian dan kualitas daya dukung lima modal di desa mereka.

Rangkaian proses RPJM Desa sangat membutuhkan antusiasme kelompok masyarakat untuk mengenali kaitan antara kondisi mata pencaharian dengan kondisi lima modal di desanya, yang berkaitan erat dengan perlindungan air dan hutan di wilayah desa mereka dan sekitarnya. Oleh karenanya, proses pengkajian kondisi dusun dimulai dengan mengajak kelompok untuk memetakan dua hal yang mereka kenali dan rasakan sehari-hari, serta menjadi tumpuan hidup mereka, yakni: lima modal di desa tempat mereka hidup dan mencari nafkah serta aktivitas mata pencaharian itu sendiri.



Pemaparan Kepala Desa Lawe Buluh Didi tentang potensi ancaman dan tindakan terkait perlindungan kawasan sumber air.

Melalui pintu masuk ini diharapkan tiap-tiap dusun dapat menyampaikan kepentingan pribadi serta kegelisahan mereka terkait mata pencahariannya, untuk selanjutnya terakomodasi dalam sketsa desa. Dengan demikian proses-proses pengkajian kondisi dusun dapat berjalan dengan lebih partisipatif serta mengairahkan bagi peserta.

Pada pendekatan RPJM Desa yang berkelanjutan, sebaiknya tim penyusun didampingi oleh perwakilan dari KPH yang mengelola sekitar kawasan desa. Tim RPJM Desa dan warga perlu dijelaskan status pemanfaatan wilayah yang dikelola warga secara jelas oleh KPH, misalnya kebun campur, ataupun lahan milik warga yang berada di dalam hutan. Bagaimana kedudukan lahan-lahan yang dikelola warga dengan tipe blok pengelolaan (lindung, pemanfaatan, rehabilitasi, budidaya) oleh KPH, dan apa yang dapat dilakukan untuk pengelolaan selanjutnya.

2.2. Langkah Menyusun Sketsa Desa

Langkah menyusun sketsa desa memanfaatkan sumber data agar dapat mengarahkan pada perencanaan yang efektif dan efisien. Para fasilitator desa terkait, diharapkan dapat mempersiapkan bahan materi untuk pemetaan dasar seperti citra satelit¹ atau peta rupa bumi Indonesia (RBI)² dengan skala kecil. Menggunakan salah satu dari dua bahan dasar ini dapat memberi visualisasi yang menarik kepada masyarakat dan tim penyusun mengenai keadaan desa keseluruhan yang membantu proses identifikasi lahan, penamaan wilayah, dan perencanaan. Berdasarkan data ini, komunikasi dan koordinasi dengan unsur masyarakat adalah hal penting lain dalam menyusun sketsa desa.

Adapun langkah-langkah menyusun sketsa desa sebagai berikut :

1. Pemandu (tim penyusun RKP Desa dan/atau pedamping desa) secara singkat menjelaskan tujuan dari sesi ini.
2. Pemandu menjelaskan keadaan desa sesuai dengan visualisasi dari citra satelit atau RBI.
3. Pemandu bersama peserta yang hadir menggambarkan penggunaan ruang dalam desa di atas citra satelit atau peta RBI dengan menggunakan bahasa lokal setempat (toponimi). Kegiatan ini dilakukan untuk mengkompilasi data kunci terkait keruangan desa. Toponimi akan menjadi sumber dalam proses membuat peta dasar desa. Misalnya, sumber air dan alirannya, kantor pemerintahan (kepala desa/RT/RW), hutan (Hutan Lindung, Hutan Adat, Hutan Konservasi, Hutan Tanaman Rakyat) tempat pelayanan sosial (Pustu, TPA, TPU, masjid), tanah ulayat/adat, pemukiman, hutan, sungai, persawahan, sumber ekonomi, pesisir dan sebagainya. Tabel berikut dapat digunakan sebagai dasar pengumpulan data toponimi dan mengidentifikasi potensi desa dan arahan untuk mengajukan zonasi di desa.

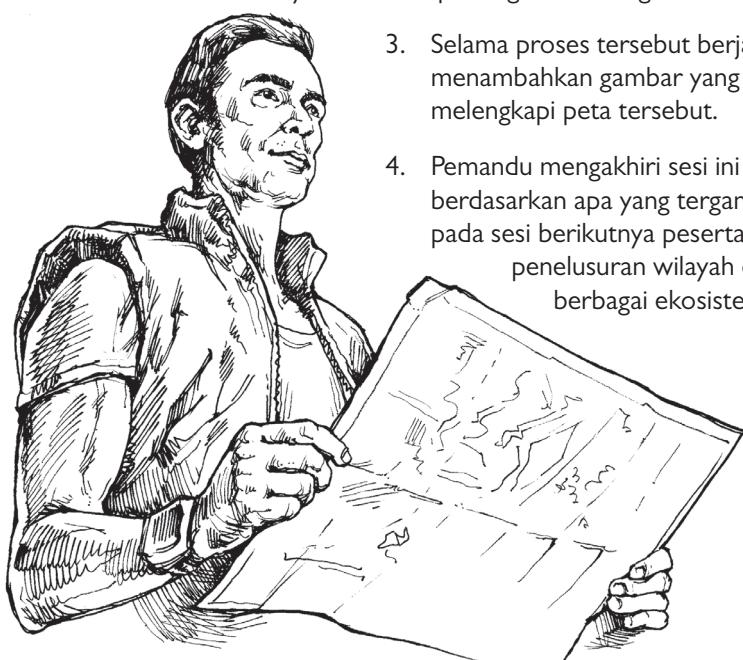
¹ Citra untuk sketsa desa diperlukan dengan skala kecil minimal 1:5000. Dapat diakses dengan instal aplikasi Google Earth melalui <https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html>

² Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000 dapat diperoleh dengan permohonan kepada Kantor BAPPEDA atau Pekerjaan Umum di kabupaten setempat.

TABLE I. DASAR TOPONIMI UNTUK SKETSA DESA

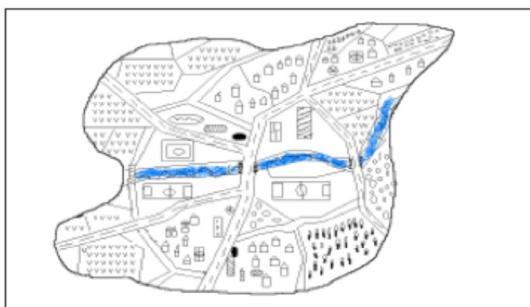
Toponimi	Nama Daerah	Ada Apa di Lokasi (Potensi & Masalah)
Daerah sakral		
Nama geografis (lembah, gunung, sungai, dll.)		
Nama kebun		
Nama fasilitas umum dan infrastruktur (termasuk kedai)		
Nama dusun		
Nama jalan		
Sumber daya alam desa (sumber air, wilayah HHBK, jaringan irigasi, pintu air, jaringan air bersih).		

1. Pemandu menganjurkan peserta untuk membuat kode-kode berdasar tipe pemanfaatan lahan, tipe tanah (misal gambut, bakau), dan elemen di sekitarnya, jenis sumber daya alam, keadaan alam misalnya wilayah gunung kapur, hutan, air terjun, pemakaman adat (jika ada), serta wilayah rentan.
2. Pemandu membagi peserta dibagi dalam kelompok kecil (lebih kurang 1 kelompok berjumlah 5 orang). Kelompok tersebut sebaiknya memerhatikan keterwakilan perempuan, pemuda, pria, dan penyandang disabilitas. Kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan identifikasi wilayah-wilayah di desa dengan fungsi dan karakteristik dan mengapa wilayah tersebut penting untuk warga atau sekedar untuk diketahui.
3. Selama proses tersebut berjalan, peserta dapat menambahkan gambar yang diperlukan untuk melengkapi peta tersebut.
4. Pemandu mengakhiri sesi ini dengan menjelaskan bahwa berdasarkan apa yang tergambar pada peta tersebut, pada sesi berikutnya peserta akan melakukan penelusuran wilayah dan pemotretan pada berbagai ekosistem yang ada.



Contoh sketsa desa dapat dilihat berikut ini.

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

Sumber: Lampiran Permendagri 114 Tahun 2014.

Pertanyaan-pertanyaan pemandu yang dapat didiskusikan didalam menyusun peta dasar sebagai berikut:

- Apa saja wilayah-wilayah di desa yang dikenali/diidentifikasi warga (lokasi pertanian, lokasi tanah ulayat, lokasi berburu, wilayah permukiman, wilayah hutan/gambut/bakau, tanaman-tanaman penting, habitat spesies tertentu yang dikenali warga)?
- Mengapa suatu wilayah penting untuk diketahui dan bagaimana pentingnya untuk warga?
- Apa saja aktivitas ekonomi/kehidupan lainnya yang berlangsung di masing-masing ekosistem?
- Apakah desa pernah mengalami bencana, dimana?
- Apa dan di mana posisi mata pencaharian kita (warga desa) dalam peta tersebut?
- Dimana posisi air/sumber air dalam kehidupan warga desa?
- Bagaimana posisi hutan dalam kehidupan warga desa?
- Wilayah mana yang menjadi prioritas warga? Mohon diurutkan. Mengapa menjadi prioritas warga?
- Apa saja potensi komoditi yang tersedia di hutan?
- Bagaimana kebijakan RTRW dan RDTR diterapkan dalam sketsa desa?

2.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan

Proses penyusunan sketsa desa dilakukan sekitar 4 (empat) jam. Bahan yang dibutuhkan untuk menyusun sketsa desa antara lain kertas plano, plastik ukuran A1 untuk menggambar diatas peta, penanda, laken, spidol, krayon dan pensil.

PENELUSURAN WILAYAH

3.1. Pengantar

Setelah membuat sketsa dusun, peserta (warga dusun terpilih dalam penyusunan RPJM Desa) perlu mengamati langsung, mencatat dan mengungkapkan kondisi dari berbagai unsur dalam berbagai identifikasi wilayah yang sebelumnya dilakukan serta mata pencaharian yang ada. Dengan melakukan pengamatan serta pencatatan dan bila perlu ditambah dengan diskusi informal (“ngobrol”) dengan masyarakat setempat, peserta diharapkan nantinya dapat mengungkapkan lebih banyak informasi terkait kondisi dusun dan mata-pencahariannya.

Pada proses penelusuran wilayah, sebaiknya peserta didampingi oleh tim penyusun RPJM Desa yang mengetahui status wilayah secara hukum. Dalam penelusuran ini, peserta mengetahui apakah wilayah yang dimanfaatkan masuk dalam wilayah pengelolaan konsesi kayu (IUPHHK), dalam hutan lindung, atau taman nasional. Dengan memahami posisi lahan yang dimanfaatkan ini, peserta dapat mempertimbangkan dan memberi masukan pada tim penyusun dan perwakilan KPH (jika ada) untuk rasionalisasi besaran wilayah untuk lokasi mata pencaharian warga (kebun, ladang, HPHBK) yang diperlukan warga dan pengelolaan KPH. Pada proses ini masyarakat dapat menentukan skala prioritas yang disepakati bersama, dan membuat zonasi atau alokasi wilayah berdasar biofisik, mata pencaharian, sumber daya alam, budaya, dan lainnya. Informasi-informasi tersebut nantinya dapat dibahas bersama untuk melihat hubungan antar unsur-unsur wilayah dan mata pencaharian.



3.2. Langkah Penelusuran Wilayah

Penelusuran wilayah bertujuan untuk validasi toponomi, penggunaan lahan, dan keadaan desa yang sebelumnya digambarkan pada sesi awal sketsa desa berada di lokasi yang benar. Proses penelusuran wilayah perlu mengikutsertakan beragam perwakilan masyarakat di desa agar dapat lebih banyak informasi mengenai kondisi desa dan mata pencarian warganya. Kegiatan penelusuran wilayah ini juga membutuhkan keahlian dasar tim untuk mencocokkan peta dan keadaan riil di lokasi. Paling sedikit tim yang terpilih berjumlah lima orang. Jika tersedia, tim ini dibekali keahlian dasar menggunakan teknologi *global positioning system* (GPS) yang terdapat di telepon pintar (*smart phone*)³ atau *GPS hand held*⁴.

Adapun kegiatan penelusuran wilayah ditempuh dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Pemandu (tim penyusun dan/atau pendamping desa) secara singkat menjelaskan tujuan dari sesi ini.
2. Pemandu mengajak peserta untuk melihat kembali sketsa dusun yang telah dibuat, dan berdasarkan sketsa tersebut bersama-sama menentukan ekosistem yang akan diamati/ ditelusuri.
3. Peserta dibagi berdasarkan kelompok, kemudian bergerak menuju titik pengamatan masing-masing dan melakukan penelusuran terkait dengan 5 modal dan keadaannya.
4. Aktivitas yang dilakukan selama penelusuran adalah: mengamati dan mencatat unsur-unsur maupun mata pencarian yang ada di dalam dusun sana. Tujuannya adalah untuk mengoreksi atau menambahkan informasi yang dilakukan pada proses toponimi sebelumnya (lihat tabel I). Pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu pengamatan dan pencatatan antara lain:
 - Apa saja unsur-unsurnya?
 - Bagaimana kondisinya?
 - Apakah pernah terjadi bencana di wilayah tertentu?
 - Kaitan khusus antara satu unsur geografis (gunung, sungai, dataran tinggi, dataran rendah desa) dengan lima modal.
 - Dan pertanyaan lain yang relevan.
5. Setelah penelusuran selesai, peserta berkumpul kembali di tempat pertemuan untuk menata data-data yang mereka peroleh.
6. Selanjutnya, pemandu meminta peserta untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi 5 modal yang ada di dusunnya, serta memberikan keterangan tentang kondisi aktualnya, potensinya, masalah-masalah modal masing-masing, penyebab masalah itu terjadi dan dampak masalahnya (berapa keluarga terkena, luas lahan yang terkena, dsb.). Dapat menggunakan metaplan, 1 metaplan untuk 1 jenis modal atau dengan kertas plano. Lihat Tabel Identifikasi Masalah dibawah ini.

³ Sistem GPS di telepon pintar dapat diakses dari setting geo-location pada sistem foto. Selain itu dapat juga menggunakan aplikasi GPS yang dapat diunggah menggunakan sistem android atau *apple store*.

⁴ PGPS *hand held* adalah tipe navigasi genggam (*portable*) yang dapat dibeli dengan akurasi minimum lima meter.

TABEL 2. IDENTIFIKASI MASALAH DI DUSUN

Modal	Kondisi	Potensi	Masalah	Penyebab	Dampak
Manusia					
Sosial					
Fisik					
Alam					
Keuangan					



TEKNIK MEMBUAT PETA DASAR

4.1. Pengantar

Tujuan membuat peta dasar adalah menghasilkan peta dasar sebagai acuan untuk finalisasi sketsa desa dan tata ruang desa. Peta dasar dibuat sebagai pedoman untuk finalisasi sketsa desa, termasuk delineasi zonasi untuk tata ruang desa yang akan dilakukan. Peta dasar dibuat tim penyusun RPJM Desa sebagai proses peningkatan keahlian di bidang pemetaan. Peta dasar dapat dibuat di kertas kosong, dan lebih baik menggunakan peta dasar topografi desa atau peta dengan citra satelit (jika ada). Pada peta ini dipetakan tempat, infrastruktur atau bangunan kunci, minimal informasi lokasi sungai, jalan, lokasi desa, lokasi dan nama geografis kunci di sekitar desa (lembah, pegunungan, perbukitan) jika ada. Sebaiknya, untuk penggunaan peta dasar di tingkat desa dengan pemahaman peta yang minimal (seperti informasi garis ketinggian gunung, dan kontur) ditiadakan karena dapat membingungkan.

4.2. Langkah Membuat Peta Dasar

Langkah membuat peta dasar bisa menggunakan dua cara yaitu menggunakan perangkat lunak seperti GPS atau ArcGIS, ataupun tanpa perangkat lunak.

Menggunakan Perangkat Lunak (GPS,ArcGIS)

1. Tim GPS didampingi tim penyusun RPJM Desa melibatkan informan lokal, sesuai sketsa desa melakukan perjalanan untuk mengambil titik GPS wilayah-wilayah yang disebutkan oleh kelompok desa sebelumnya.
2. Menggunakan software pemetaan jajaki fitur inti dan diposisikan di peta seperti nama geografis (sungai utama, anak sungai, gunung, lembah), kebun, jalan, dan bangunan (kantor desa, puskesmas, dll.). Agar mudah dipahami warga, informasi yang ditampilkan dibatasi hanya pada tempat kunci yang mudah dikenali warga, dan dibedakan berdasar nama lokal, warna dan kode.
3. Melakukan verifikasi dengan peta identifikasi yang sebelumnya dibuat oleh warga
4. Jika tersedia alat printer, membuat beberapa peta salinan untuk diskusi delineasi zonasi bersama warga.

Memetakan Tanpa Perangkat Lunak

1. Tim membawa kertas kosong, dengan informan lokal, melakukan perjalanan untuk menjajaki ulang titik penting desa untuk memposisikan lokasi penting yang dikenali warga seperti nama geografis (sungai utama, anak sungai, gunung, lembah), kebun, jalan, dan bangunan (kantor desa, puskesmas, dll.). Agar mudah dipahami warga, informasi yang ditampilkan dibatasi hanya pada lokasi atau tempat kunci yang mudah dikenali warga, dan dibedakan berdasarkan nama lokal, warna dan kode.
2. Jika tersedia *print-out* peta dasar rupa bumi atau *print-out* peta dengan citra satelit, kegiatan diatas akan lebih mudah dilakukan.
3. Menggunakan peta dasar rupa bumi atau *print-out* peta dengan citra satelit, lapisi peta dengan plastik, berikan penamaan lokal pada lokasi penting. Selanjutnya, berikan kode spesifik, dan warna untuk memudahkan identifikasi dan verifikasi selanjutnya. Sebagai contoh, gambar dibawah ini merupakan *print-out* peta yang sudah dilapisi dengan plastik.
4. Melakukan verifikasi dengan peta identifikasi yang sebelumnya dibuat oleh warga.
5. Langkah yang dilakukan diatas dilanjutkan dengan membuat salinan dari hasil sketsa diatas plastik menjadi peta dasar desa. Peta dasar ini digunakan untuk diskusi delineasi zonasi bersama warga.

4.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan

Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun peta dasar lebih kurang 6 jam. Bahan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu kertas plano, peta dasar dengan topografi (jika ada), peta dengan citra satelit (jika ada), spidol berwarna, *post-it* berbagai warna, plastik untuk melapis peta dan GPS (jika ada).



ANALISIS KALENDER MUSIM

5.1. Pengantar

Analisis kalender musim perlu dilakukan dalam pengkajian keadaan desa bertujuan agar dapat mengkaji dan menyajikan “pola musiman” dari bulan ke bulan dalam periode satu tahun menurut kegiatan mata pencaharian dan sosial budaya. Tujuan lainnya agar desa mempunyai kajian “pola musiman” baik dalam hal permasalahan, penyebab dan potensinya.

Dengan menganalisis “pola musim” dari bulan ke bulan dalam periode satu tahun dari aspek-aspek: hujan/kemarau, kondisi ekosistem serta aktivitas ekonomi/kehidupan lainnya dapat dilihat dengan lebih jelas, diharapkan peserta dapat melihat lebih jelas lagi tentang hubungan antara pola musim hujan/kemarau dengan kondisi ekosistem maupun aktivitas ekonomi/kehidupan lainnya.

Disamping itu, dengan melihat pola musim dari bulan ke bulan tersebut, peserta dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan aksi untuk memperbaiki ekosistem hutan dan meningkatkan kualitas kehidupan warga desa sehari-hari.



5.2. Langkah Menganalisis Kalender Musim

Langkah-langkah menganalisis kalender musim sebagai berikut:

1. Pemandu menjelaskan secara singkat latar belakang, tujuan dan keluaran dari sesi ini.
2. Pemandu meminta kelompok untuk membagi diri kedalam kelompok kecil (kelompok yang sama dengan kelompok Penelusuran Wilayah).
3. Setiap kelompok kecil diminta untuk menganalisa “pola musiman” dalam 1 tahun (yang biasa terjadi dalam beberapa tahun terakhir) dari aspek-aspek terkait dengan mata pencaharian dan sosial budaya. Lihat contoh berikut ini.

TABEL 3. POLA MUSIMAN DI DUSUN

ASPEK	Pola musiman pada bulan:											
	Pancaroba			Kemarau					Hujan			
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Hujan												
Kemarau												
Masing2 Kegiatan Pertanian												
Musim Tanam												
Musim Panen												
Kegiatan perekonomian lain												
Pesta												
Kegiatan keagamaan												
Musim Penyakit												
Dsb.												

Catatan: Sesuaikan dengan pola musiman di desa dan tandai pada bulan mana ada kegiatan tertentu.

4. Tempelkan pada dinding kalender musim yang telah terisi secara lengkap. Selanjutnya tanyakan pertanyaan berikut dengan mengisi tabel berikut.
 - Masalah-masalah apa yang terjadi pada masa yang mana?
 - Mengapa masalah-masalah terjadi?
 - Dimana lokasi?
 - Apa akibat masalah?
 - Berapa banyak yang terkenal?
 - Potensi apa yang ada?

TABEL 4. ALAT KAJI KALENDER MUSIM

Masalah	Penyebab	Dimana	Akibat	Dampak Berapa KK Terkena/luas lahan	Potensi

Catatan: Jika ingin dikaji modal mana yang paling berdampak dari alat kaji kalender musim, ini bisa sebagai prioritas dalam menentukan usulan di tim penyusun.

5.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan

Waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis kalender musim lebih kurang 4 jam. Persiapkan bahan seperti kertas plano, spidol, lakban, crayon atau pensil warna.



TEKNIK MEMBUAT DIAGRAM KELEMBAGAAN (DIAGRAM VENN)

6.1. Pengantar

Diagram kelembagaan atau diagram venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di dusun (dan lingkungannya).

Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram venn bisa sangat umum atau berdasarkan topik misalnya diagram venn untuk lembaga-lembaga tertentu saja. Dapat juga, misalnya, diagram venn yang khusus berhubungan dengan kelembagaan penyuluhan, pertanian, kesehatan ataupun pengairan saja.

Diagram venn adalah gambaran keadaan lembaga yang ada di dusun serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram venn digunakan sebagai alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan. Tujuan pembuatan diagram kelembagaan antara lain :

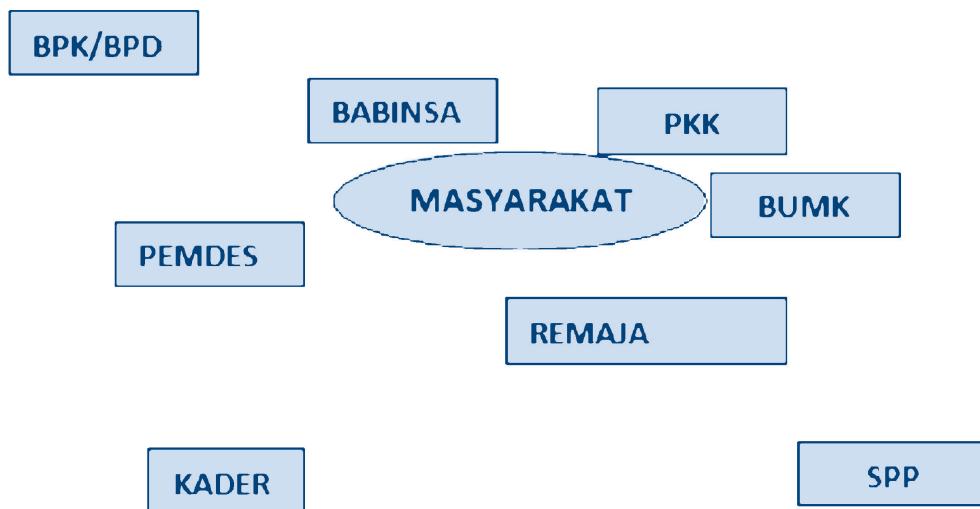
1. Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di dusun.
2. Untuk mengetahui besar kecilnya peranan/manfaat lembaga-lembaga bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat.
4. Untuk mengetahui masalah dan potensi pada lembaga-lembaga yang ada.

6.2. Langkah Membuat Diagram Kelembagaan

Untuk membuat diagram kelembagaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Siapkan lingkaran (besar, sedang dan kecil) yang dipotong dari kertas meta-plan.

2. Minta peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada di wilayah mereka dan tulis nama lembaga pada kertas plano.
3. Ajaklah peserta mendiskusikan peran lembaga terhadap kehidupan masyarakat dari perannya paling besar sampai yang paling kecil.
4. Selanjutnya mintalah peserta untuk menuliskan nama lembaga yang pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil pada lingkaran yang paling kecil.
5. Tempel beberapa kertas plano pada dinding dan ditengahnya tertulis "MASYARAKAT".
6. Selanjutnya minta peserta mendiskusikan bagaimana hubungan lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, lembaga yang hubungannya paling dekat atau komunikasinya paling baik ditempatkan paling dekat dengan tulisan "masyarakat" dan lembaga yang kurang dekat dengan masyarakat ditempatkan agak jauh, demikian seterusnya sampai semua lingkaran terpampang. Lihat contoh di bawah ini.



Setelah diagram kelembagaan selesai dibuat, konfirmasikan kembali dengan peserta musyawarah dusun. Kemudian minta peserta untuk menggali permasalahan, penyebab dan potensi lembaga-lembaga tersebut satu per satu diawali dari lingkaran yang terdekat dengan masyarakat. Masalah, penyebab dan potensi yang digali berkaitan dengan:

- Struktur organisasi
- Kapasitas SDM
- Aturan mainnya
- Manajemen organisasi
- Legalitas organisasi

Format Hasil Kajian Diagram Kelembagaan sebagai berikut.

No.	Nama Lembaga	Masalah	Penyebab	Potensi
1	PEMDES	Pemdes dalam pelayanan kepada masyarakat belum memuaskan	Kapasitas perangkat rendah, personil kurang	Kantor, Lembaga, SDM
2	KAUR	Pelayanan kaur belum optimal, terbatasnya aktivitas di ruang kerja	1. Jam pelayanan kurang, 2. Disiplin jam tugas, 3. Masa kerja baru	1. Meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tupoksi 2. Sangsi dan penghargaan dari kades kepada aparatnya dalam melaksanakan pelayanan 3. Jam/ hari pelayanan khusus untuk pengurusan administrasi yang khusus.
3	Dan seterusnya			

6.3. Waktu dan Bahan yang Dibutuhkan

Waktu yang dibutuhkan untuk memandu penyusunan diagram kelembagaan biasanya 3-4 jam. Pemandu dapat mempersiapkan meta plan, kertas plano, spidol, penggaris dan lakban kertas.



DAFTAR BACAAN

1. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
2. Peraturan Desa Buntoi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buntoi Tahun 2016 - 2021
3. Peraturan Desa Garung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 - 2019
4. Peraturan Desa Gohong Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021
5. Peraturan Desa Mantaren I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 - 2018
6. Peraturan Desa Saka Kajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 - 2019
7. Qanun Gampong Lawe Cimanok Kemukiman Makmur Kecamatan Kluet Timur Nomor 1 Tahun 2015 - 2020

PANDUAN PENYUSUNAN RPJM DESA HUTAN BERKELANJUTAN



USAID LESTARI

WISMA GKBI, 12th Floor Suite 1210
Jl. Jenderal Sudirman No. 28,
Jakarta Indonesia 10210